

Anwar Usman Ketua MK Lagi, Pakar Hukum Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk waspada atas terpilihnya kembali Anwar Usman sebagai Ketua MK 2023-2028. Ia mengaitkan potensi konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan mengingat Anwar Usman merupakan Ipar dari Presiden RI Joko Widodo."Masalahnya tentu ada di Pak Anwar Usman yang memang merupakan adik ipar presiden ya; sementara, kok, sebagian besar kewenangan MK berkaitan dengan Presiden. Menjadi catatan penting untuk Mahkamah Konstitusi waspada bagaimana jika kemudian hari relasi konflik kepentingan itu muncul."ujarnyaFeri juga menyarankan MK untuk membentuk Hukum Acaranya sendiri dalam peradilan Pidana dan Perdata. Hal tersebut bertujuan agar persidangan di MK tidak hanya diatur dengan Peraturan MK saja."Yang paling penting itu MK harus punya hukum acara Mahkamah Konstitusi agar persidangannya tidak diatur berdasarkan peraturan MK sendiri. Tidak kemudian bergabung dengan hukum atau undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri."Sebelumnya Anwar Usman terpilih kembali menjadi Ketua MK dua periode masa jabatan 2023 - 2028. Anwar Usman terpilih pada putaran ketiga setelah mengimbangi perolehan suara Arief Hidayat dengan suara 4-4 dalam rapat Pleno pemilihan Ketua dan Wakil MK pada 15 Maret 2023.Pemungutan suara dilakukan setelah musyawarah penentuan Ketua MK tidak menemukan kesepakatan. Dalam kesempatan itu ada sembilan hakim yang mengikuti pemilihan.Sembilan hakim itu adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.Pilihan Editor: Malaysia Usut Paket Pasta Gigi Ganja yang Dikirim dari Indonesia